

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 166 adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker harus belajar ilmu komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan pasien sehingga dapat menyampaikan informasi tentang penggunaan obat yang rasional.
2. Meningkatkan kualitas pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) agar pasien lebih mengerti cara penggunaan obat dan alat kesehatan yang diperoleh dengan benar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan sehingga mampu memberikan efek terapi yang optimal.
3. Menggunakan kembali kartu *Patient Medication Record* (PMR), Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan *Monitoring* Efek Samping Obat (MESO) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat.
4. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya berikut obat-obat yang sudah digunakan, disinilah peran apoteker dapat berfungsi secara optimal dengan memberikan informasi obat serta dapat memberikan pengobatan swamedikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M., 2005, *Manajemen Farmasi*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- British National Formulary 57th ed, 2009. BMJ Group and RPS Publishing, London.
- IAI, 2012, **Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian**, Surabaya
- Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Standar pelayanan Kefarmasian di Apotek. Kepmenkes Nomor 1027 tahun 2004.
- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009, *Drug Information Handbook*, ed. 17th, American Pharmacists Association, North American.
- McEvoy, G. K., 2011, *AHFS Drug Information Essential*, American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Bethesda, Maryland.
- Menkes RI, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang **Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menkes RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang **Pekerjaan Kefarmasian**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menkes RI, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tentang **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta.

Menkes RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang **Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor** Farmasi, Menteri Kesehatan, Jakarta.

MIMS. 2017. MIMS Indonesia. <https://www.mims.com/> [online]. Diakses pada Februari 2017.

Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang **Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Apotek**, Permenkes Nomor 922 / MENKES / PER / X / 1993.

Presiden RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang **Kesehatan**, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L., 2008. **Manajemen Farmasi : Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi**, ed. 2, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.

Sweetman, S. C., 2009, **Martindale The Complete Drug Reference**, ed. 36th, The Pharmaceutical Press, London.

Tatro, D. S., 2003, **A to Z Drug Facts**, Facts and Comparisons.